

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Urbanisasi merupakan fenomena global yang mengalami pertumbuhan sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018, lebih dari 55% penduduk dunia tinggal di wilayah perkotaan, dan angka ini diproyeksikan akan meningkat hingga mencapai 68% pada tahun 2050 (Nations, 2018). Migrasi besar-besaran dari pedesaan ke perkotaan ini kerap disambut dengan optimisme karena berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, dan perluasan akses terhadap layanan publik. Namun, urbanisasi yang tidak diimbangi dengan kapasitas perencanaan dan pengelolaan kota dapat menimbulkan konsekuensi negatif seperti kemacetan lalu lintas, permukiman kumuh, kerusakan lingkungan, serta ketimpangan sosial dan ekonomi (Bank, 2023). Oleh karena itu, perhatian terhadap kualitas hidup di wilayah perkotaan menjadi sangat penting dalam guna mewujudkan kota yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.

Salah satu konsep yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup di perkotaan adalah Livability, yaitu kualitas lingkungan perkotaan yang muncul akibat interaksi antara karakteristik fisik kota dan kebutuhan subjektif individu yang tinggal di dalamnya (Pacione, 2003). Sementara itu, aspek keadilan sosial, kohesi komunitas, dan kualitas lingkungan fisik menjadi indikator penting dalam menentukan tingkat kelayakhunian kota. Kota yang layak huni adalah kota yang

mampu menyediakan layanan dasar seperti air bersih, pendidikan, transportasi umum yang efisien, ruang publik yang aman, serta memiliki sistem tata kelola yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warganya (Bank, 2023). Dengan demikian, Livability tidak hanya berfokus pada kenyamanan fisik semata, tetapi juga menyangkut kualitas sosial dan tata kelola kota secara menyeluruh. Dalam konteks pembangunan kota di Indonesia, urgensi akan pencapaian Livability semakin meningkat seiring dengan semakin kompleksnya tantangan urbanisasi. Pertumbuhan penduduk perkotaan yang pesat sering kali tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas pelayanan publik dan infrastruktur dasar. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat, terutama di kota-kota besar yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial. Meskipun belum terdapat satu indeks baku nasional yang secara resmi digunakan untuk mengukur Livability, kesadaran akan pentingnya menciptakan kota yang layak huni mulai tercermin dalam berbagai kebijakan perkotaan. Pemerintah kota juga mulai menekankan pentingnya infrastruktur yang mendukung kelayakhunian, termasuk kawasan permukiman, fasilitas pendidikan, dan pelayanan publik yang layak sebagai bagian dari pembangunan kota. Hal ini menjadikan Livability sebagai salah satu arah kebijakan strategis dalam perencanaan kota yang berkelanjutan dan inklusif.

Kota yang layak huni merupakan tujuan strategis dalam pembangunan perkotaan, terutama di tengah laju urbanisasi yang pesat di Indonesia. Namun, hingga kini berbagai permasalahan layanan dasar masih menjadi tantangan besar bagi banyak pemerintah kota. Fenomena ini menunjukkan bahwa capaian

Livability belum sepenuhnya mencerminkan arah pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif.

Salah satu permasalahan utama adalah buruknya sistem transportasi publik di berbagai kota. Kementerian Perhubungan mencatat bahwa lebih dari 515 kota dan kabupaten di Indonesia masih menghadapi persoalan transportasi, mulai dari rendahnya kualitas layanan hingga kemacetan akibat penggunaan kendaraan pribadi yang tinggi. Sayangnya, belanja daerah untuk sektor ini masih tergolong minim, yakni hanya berkisar 0,2–3,1% dari total APBD, sehingga sulit bagi pemkot untuk menyediakan infrastruktur transportasi yang aman dan terjangkau bagi warganya (Maharani, 2024).

Selain itu, pengelolaan sampah juga masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di berbagai wilayah urban. Volume sampah nasional yang mencapai lebih dari 18 juta ton per tahun belum diimbangi dengan sistem pengelolaan yang memadai. Kota-kota besar menghadapi krisis TPA yang kelebihan kapasitas, sistem pengangkutan yang tidak merata, serta keterbatasan edukasi masyarakat. Padahal, rata-rata alokasi anggaran daerah untuk urusan persampahan hanya berkisar 0,5–2%, yang tidak cukup untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh. (Saratika, 2023)

Tidak kalah penting, krisis permukiman juga menjadi tantangan besar yang berpengaruh terhadap Livability. Backlog perumahan nasional yang mencapai 12,7 juta unit menunjukkan bahwa banyak warga tidak memiliki hunian yang aman, sehat, dan terjangkau. Di sisi lain, lebih dari 38 juta jiwa tinggal di kawasan kumuh tanpa akses terhadap sanitasi layak dan infrastruktur dasar. Pembangunan hunian

rakyat dan penataan kawasan permukiman umumnya belum menjadi prioritas dalam belanja daerah, sehingga kualitas tempat tinggal masyarakat terus mengalami penurunan (Rakyat, 2022).

Ketiga fenomena tersebut memperlihatkan bahwa kapasitas fiskal pemerintah daerah berperan penting dalam menyediakan layanan publik yang mendukung terciptanya kota layak huni. Dengan kata lain, kondisi keuangan daerah sangat menentukan sejauh mana suatu kota mampu menjawab kebutuhan dasar warganya, dari transportasi yang memadai, lingkungan yang bersih, hingga perumahan yang manusiawi.

Hal ini mencerminkan kesenjangan antara visi kebijakan dengan kapasitas riil pemerintah kota dalam mewujudkan layanan publik yang mendukung Livability. Kesenjangan antara kebijakan dan kapasitas riil tersebut sebagian besar mencerminkan kondisi keuangan pemerintah kota yang belum optimal. Dalam kerangka otonomi daerah, keuangan daerah menjadi faktor penentu utama dalam penyediaan layanan publik yang layak. Pemerintah kota dengan kapasitas fiskal yang kuat akan lebih mampu menyediakan layanan dasar seperti air bersih, transportasi umum, ruang terbuka hijau, dan infrastruktur sosial lainnya yang menjadi elemen penting dalam mewujudkan kota yang layak huni (Bahl, R.; Martinez-Vazquez, 2006). Dengan demikian, kondisi keuangan bukan hanya aspek administratif, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam pembangunan kota yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Kondisi keuangan kota yang kuat tidak hanya penting secara keseluruhan, tetapi juga tercermin dalam sejumlah indikator spesifik yang menentukan sejauh

mana pemerintah kota mampu menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik secara efektif. Salah satu indikator utama tersebut adalah kapasitas operasional. Indikator ini mengukur sejauh mana pemerintah mampu menutup kebutuhan belanja operasional dari pendapatan yang tersedia, seperti gaji pegawai, pemeliharaan infrastruktur, dan biaya rutin pelayanan publik. Apabila belanja operasional tidak dapat dipenuhi secara optimal, maka kualitas layanan dasar seperti kesehatan, kebersihan kota, dan perawatan fasilitas umum akan terganggu. Hal ini berdampak langsung pada kenyamanan dan kesejahteraan warga, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari konsep Livability. Maka dari itu, kapasitas operasional yang memadai menjadi prasyarat dasar agar kota dapat berfungsi secara efisien dan responsif terhadap kebutuhan warganya (García-Sánchez, I.M.; Cuadrado-Ballesteros, B.; Frías-Aceituno, 2022; OECD, 2021).

Aspek berikutnya yang turut menentukan kemampuan fiskal pemerintah kota dalam mendukung kelayakhunian kota adalah fleksibilitas fiskal. Indikator ini merujuk pada kemampuan pemerintah kota untuk menyesuaikan struktur belanjanya setelah memenuhi kewajiban belanja wajib, seperti gaji pegawai dan biaya rutin lainnya. Daerah yang memiliki fleksibilitas fiskal tinggi umumnya memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk mendanai prioritas pembangunan, termasuk perbaikan infrastruktur, pengembangan transportasi umum, atau penyediaan layanan sosial yang inklusif. Sebaliknya, rendahnya fleksibilitas fiskal menyebabkan anggaran terserap untuk kebutuhan rutin tanpa ruang berarti bagi pengembangan pelayanan publik, yang secara langsung dapat menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, fleksibilitas fiskal

menjadi penentu penting dalam kemampuan adaptif pemerintah kota terhadap tantangan perkotaan yang dinamis (García-Sánchez, I.M.; Cuadrado-Ballesteros, B.; Frías-Aceituno, 2022; OECD, 2021).

Selain kapasitas fiskal yang memadai dan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran, keberhasilan pemerintah kota dalam menciptakan kota yang layak huni juga ditentukan oleh komitmen fiskal mempertahankan layanan publik secara konsisten. Indikator ini mencerminkan sejauh mana pemerintah mampu menjaga keberlanjutan kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan pengelolaan sampah dari waktu ke waktu. Konsistensi ini menjadi sangat penting, mengingat keberlangsungan layanan publik adalah salah satu faktor utama dalam menjaga kepuasan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Dalam konteks Livability, layanan yang terus menurun akibat pemangkasan anggaran atau lemahnya komitmen politik akan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok rentan. Maka dari itu, menjaga keberlanjutan pelayanan publik melalui alokasi anggaran yang stabil dan prioritas kebijakan yang jelas merupakan elemen kunci dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang layak huni dan berkeadilan (OECD, 2021; García- Sánchez, I.M.; Cuadrado-Ballesteros, B.; Frías-Aceituno, 2022).

Tidak hanya menjaga layanan publik yang sudah ada, pemerintah daerah juga dituntut untuk menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan publik. Indikator ini mencerminkan kapasitas pemerintah untuk melakukan inovasi kebijakan, memperluas akses, serta meningkatkan standar layanan secara berkelanjutan. Misalnya, melalui modernisasi sistem

administrasi publik, penyediaan transportasi ramah lingkungan, atau peningkatan kualitas layanan kesehatan berbasis digital. Komitmen semacam ini menunjukkan orientasi jangka panjang pemerintah dalam membangun kota yang adaptif terhadap perubahan dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Livability, peningkatan pelayanan yang terus menerus tidak hanya memperbaiki kenyamanan hidup warga, tetapi juga memperkuat daya saing kota sebagai pusat pertumbuhan. Dengan demikian, keberadaan ruang fiskal yang cukup dan tata kelola anggaran yang progresif menjadi prasyarat penting untuk mendorong transformasi layanan publik ke arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan (OECD, 2021; García-Sánchez, I.M.; Cuadrado-Ballesteros, B.; Frías-Aceituno, 2022).

Indikator terakhir yang tak kalah penting adalah kapasitas fiskal untuk melayani masyarakat, yaitu sejauh mana pemerintah kota memiliki sumber daya baik keuangan, manusia, maupun aset fisik untuk menjalankan pelayanan publik secara efektif dan berkelanjutan. Kapasitas ini mencakup kecukupan infrastruktur, kompetensi aparatur, serta kemampuan dalam merespons kebutuhan warga secara cepat dan tepat. Ketika kapasitas ini lemah, pelayanan publik cenderung bersifat minimal, tidak merata, dan lambat. Sebaliknya, kapasitas pelayanan yang kuat memungkinkan pemerintah untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan kualitas layanan yang setara. Dalam kaitannya dengan Livability, tingginya kapasitas pelayanan menciptakan kepercayaan publik, stabilitas sosial, serta lingkungan kota yang mendukung kesejahteraan bersama. Maka dari itu, investasi dalam pembangunan kapasitas kelembagaan dan teknis menjadi bagian krusial

dalam strategi peningkatan kelayakhunian kota (García-Sánchez, I.M.; Cuadrado-Ballesteros, B.; Frías-Aceituno, 2022; OECD, 2021).

Kelima indikator tersebut secara keseluruhan mencerminkan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan layanan publik yang merata, berkelanjutan, dan berkualitas. Mulai dari kemampuan menutup belanja operasional, fleksibilitas penganggaran, hingga komitmen dalam mempertahankan serta meningkatkan kualitas layanan, seluruh aspek tersebut berperan langsung dalam menentukan tingkat kelayakhunian sebuah kota. Dengan demikian, kondisi keuangan daerah dapat dipandang sebagai fondasi penting dalam menciptakan kota yang layak huni.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi yang dilakukan oleh Ritonga dan Buanaputra (2022) yang berjudul “Developing rules of thumb for the financial conditions of city Livability: a study of municipal governments in Indonesia”. Penelitian tersebut meneliti hubungan antara indikator kondisi keuangan pemerintah dan tingkat Livability kota di Indonesia. Penelitian tersebut merupakan rujukan penting dalam topik ini, meskipun menggunakan data dengan cakupan waktu yang berbeda. Jika pada penelitian sebelumnya digunakan data indeks Livability tahun 2017, maka dalam penelitian ini digunakan data yang lebih baru, yaitu Most Livable City Index (MLCI) tahun 2022 yang dirilis oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP). Perbedaan tahun data ini penting karena dapat menggambarkan kondisi terkini kota-kota di Indonesia, baik dari sisi keuangan kota maupun kualitas kelayakhunian kota.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji secara empiris pengaruh antara kondisi keuangan pemerintah kota dan tingkat Livability, yang dituangkan dalam judul **“Hubungan Kondisi Keuangan dengan Livability: Studi pada Pemerintah Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2022.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kondisi keuangan pemerintah kota di Indonesia terhadap tingkat Livability. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Bagaimana Kapasitas Operasional pada Pemerintah Kota di Indonesia tahun anggaran 2022.
2. Bagaimana Fleksibilitas Fiskal pada Pemerintah Kota di Indonesia tahun anggaran 2022.
3. Bagaimana Komitmen untuk Mempertahankan Layanan pada Pemerintah Kota di Indonesia tahun anggaran 2022.
4. Bagaimana Komitmen untuk Meningkatkan Layanan pada Pemerintah Kota di Indonesia tahun anggaran 2022.
5. Bagaimana Kapasitas untuk melayani masyarakat pada Pemerintah Kota di Indonesia tahun anggaran 2022.
6. Bagaimana tingkat Livability di Indonesia tahun 2022.
7. Seberapa besar hubungan antara Kapasitas Operasional dengan Livability pada Pemerintah Kota di Indonesia tahun anggaran 2022.

8. Seberapa besar hubungan antara Fleksibilitas Fiskal dengan Livability pada Pemerintah Kota di Indonesia tahun anggaran 2022.
9. Seberapa besar hubungan Komitmen untuk Mempertahankan Layanan dengan Livability pada Pemerintah Kota di Indonesia tahun anggaran 2022.
10. Seberapa besar hubungan Komitmen untuk Meningkatkan Layanan dengan Livability pada Pemerintah Kota di Indonesia tahun anggaran 2022.
11. Seberapa besar hubungan Kapasitas untuk Melayani Masyarakat dengan Livability pada Pemerintah Kota di Indonesia tahun anggaran 2022.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Kapasitas Operasional pada pemerintah kota di Indonesia tahun anggaran 2022.
2. Untuk mengetahui bagaimana Fleksibilitas fiskal pada pemerintah kota di Indonesia tahun anggaran 2022.
3. Untuk mengetahui bagaimana Komitmen untuk mempertahankan layanan pada pemerintah kota di Indonesia tahun anggaran 2022.
4. Untuk mengetahui bagaimana Komitmen untuk meningkatkan layanan pada pemerintah kota di Indonesia tahun anggaran 2022.
5. Untuk mengetahui bagaimana Kapasitas untuk melayani masyarakat pada pemerintah kota di Indonesia tahun anggaran 2022.
6. Untuk mengetahui bagaimana tingkat Livability di Indonesia tahun 2022.

7. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan Kapasitas Operasional dengan Livability pada pemerintah kota di Indonesia tahun anggaran 2022.
8. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan Fleksibilitas Fiskal dengan Livability pada Pemerintah Kota di Indonesia tahun anggaran 2022.
9. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan Komitmen untuk mempertahankan layanan dengan Livability pada pemerintah kota di Indonesia tahun anggaran 2022.
10. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan Komitmen untuk meningkatkan layanan dengan Livability pada Pemerintah Kota di Indonesia tahun anggaran 2022.
11. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan Kapasitas untuk melayani dengan Livability pada Pemerintah Kota di Indonesia tahun anggaran 2022.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut.

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang keuangan daerah dan

perencanaan kota. Penelitian ini dapat menambah literatur terkait bagaimana indikator kondisi keuangan pemerintah kota memengaruhi kualitas kelayakhunian suatu wilayah.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah kota dalam mengevaluasi pengelolaan keuangannya, khususnya dalam aspek operasional, fleksibilitas anggaran, dan komitmen terhadap pelayanan publik, guna mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan kota yang layak huni.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan perbandingan bagi peneliti lain yang berminat mengkaji topik serupa, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh indikator fiskal terhadap kualitas tata kelola kota. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumber literatur dalam pengembangan karya ilmiah di bidang akuntansi publik dan kebijakan pengembangan daerah.